

**PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BANJIR
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011**

**Herman Siregar
Hery Suryadi
hshermansiregar@gmail.com**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the performance of the functions of coordination in the prevention and flood control was implemented. While the methods used in this research is a qualitative method, wherein the method is demonstrated to research procedures that produce qualitative data that phrase or note observed.

The results of this study showed that exercising the functions of coordination Pekanbaru City Government in the prevention and flood control in the city of Pekanbaru not run with the maximum, , This is because the implementation of coordination meetings conducted Executing Unit for Disaster Management (Satlak PB) with the institutions involved are not going well, so that the expected results are not optimal.

The conclusion of this research is the implementation of Disaster Management Unit (Satlak PB) Pekanbaru City is an institution established by the Government of the menagai Pekanbaru disasters including catastrophic flooding problem in the city of Pekanbaru where policy / general rules issued Pekanbaru City Government in tackling disasters flooding is Pekanbaru Mayor Decree No. 49 Year 2009 on the establishment of Disaster Management Implementation Units (Satlak PB) Pekanbaru.

It is done by the City of Pekanbaru on prevention and flood control in the city of Pekanbaru not run with the maximum, this is due to the implementation of the coordination meetings conducted Executing Unit for Disaster Management (Satlak PB) with the relevant agencies is very limited and not fully implemented.

Key Note : Coordination, Communication, Cooperation

PENDAHULUAN

Mungkin Kota banjir, Begitu julukan yang pantas diberikan kepada Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Luapan air yang begitu deras, melanda ke hampir berbagai penjuru kota, bahkan hingga di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru. Selama ini penanganan banjir lebih banyak pada bagaimana tindakan mitigasi dan penyelamatan korban pada saat banjir terjadi, sementara itu tindakan pencegahan dan antisipasi masih kurang dilakukan.

Dari beberapa penyebab banjir di kota Pekanbaru, hal lain yang turut mempengaruhi adalah keterlibatan instansi yang memiliki keterkaitan dengan penanganan masalah banjir yaitu mengenai bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait dalam pencegahan dan pengendalian banjir di kota Pekanbaru. Menurut George R. Terry (Riyadi Bratakusumah, 2004 : 312) Koordinasi itu berupa sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha menciptakan pengaturan waktu dan terpinpin, dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, dalam pelaksanaannya koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak perencanaan, pengendalian dan pengawasan sampai evaluasinya.

Masalah yang dihadapi dalam melakukan program Pencegahan dan pengendalian banjir adalah masalah komunikasi dan koordinasi, sebaiknya komunikasi antara instansi-instansi terkait melakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah pengendalian dan pencegahan banjir di kota Pekanbaru secara rutin. Hal inilah yang membuat selama ini penanganan banjir yang terjadi di kota Pekanbaru masih belum optimalnya, dimana sejauh ini, penanganan banjir yang ada di Pekanbaru terkesan lamban, dan tidak melihat kondisi yang ada dilapangan, bahkan ada yang pengerjaan yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1990 : 198) dalam pelaksanaan pembangunan masalah yang tidak kalah penting adalah masalah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan berbagai program didalam suatu sektor atau antar sektor, terutama yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai lembaga. Pertama, perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana yang secara fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor atau antar sektor, sebaiknya wewenang tersebut diletakkan pada badan/lembaga secara fungsional paling bertanggung jawab atas program-program sektor atau antar sektor. Kedua, perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik, dengan ini diharapkan kejelasan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh masing-masing badan/lembaga yang berhubungan. Ketiga, dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsionalisasi perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas, dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini diperlukan bentuk dan cara kerja masing-masing organisasi yang sesuai dan jelas. Keempat, perlu pula dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan

kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab koordinasi yang jelas. Namun perlu dijaga agar hal ini tidak mengurangi tugas-tugas dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang telah ada secara fungsional.

Pada tahun 2009, konsultan asal Belanda yang bernama Royal Haskoning, menghibahkan dana kepada Pemko Pekanbaru senilai lebih kurang Rp. 4 miliar untuk program perbaikan sanitasi menyangkut limbah, sampah dan tata drainase. Kemudian Pemko Pekanbaru menginstruksikan kepada satker-satker yang terlibat dalam proses pencegahan dan penanggulangan banjir di Pekanbaru untuk membentuk Kelompok Kerja (pokja).

Menurut Riyadi Bratakusumah (2004 : 310), dalam pembangunan daerah guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan pasti akan melibatkan berbagai unsur atau komponen, baik sebagai objek maupun sebagai subjeknya. Tingkat keterlibatan berbagai komponen tersebut terbagi ke dalam berbagai variasi fungsi dan peranan. Variasi fungsi dan peranan tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan.

Pada umumnya penanganan masalah banjir diperlukan suatu strategi, yang merupakan suatu kesatuan rencana yang luas dan terintegrasi yang menghubungkan antara kekuatan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Strategi dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai melalui implementasi yang tepat. Substansi strategi pada dasarnya merupakan rencana oleh karena itu strategi berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan alternatif yang tersedia bagi suatu manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik ingin meneliti tentang "Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Pencegahan dan Pengendalian Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2011".

RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Pencegahan dan Pengendalian banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2011?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pencegahan pengendalian dan banjir di kota Pekanbaru tahun 2011

LANDASAN TEORI

Sehubungan dengan masalah koordinasi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli diantaranya yang dikemukakan oleh Leonard D. White dalam Inu Kencana Syafie (1998 : 41) menyatakan bahwa "*Coordination is the adjustment of the part of each other, of the movement and operation of the part in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole* .

Artinya, koordinasi adalah menyesuaikan diri dengan bagian-bagian satu sama lain dengan gerakan serta pekerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan maksimum pada hasil secara keseluruhan.

Selanjutnya James D. Money dalam Inu Kencana Syafie (1998:41) yang mengemukakan “*Coordination, therefore, is the orderly arrangement of group effort, to provide unity action in the pursuit of a common purpose*”, yang artinya bahwa koordinasi adalah pengetahuan sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama.

Jenis-jenis koordinasi menurut Daan Suganda (1988 : 45) sebagai berikut :

1. Koordinasi Intern adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit didalam organisasi.
2. Koordinasi Ekstern adalah koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antara organisasi.
3. Koordinasi Horizontal adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi setingkat.
4. Koordinasi Vertikal adalah koordinasi antar pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
5. Koordinasi diagonal adalah koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hierarkinya.
6. Koordinasi fungsional adalah koordinasi antar pejabat, unit, atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasi.

Moekijat (1994 : 57) menyatakan koordinasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini :

- a. Mengadakan pertemuan koordinasi antar pejabat
- b. Mengadakan pertemuan formal antara pejabat yang disebut rapat
- c. Membuat edaran berantai kepada pejabat yang diperlukan
- d. Menyebarkan kartu nama kepada pejabat yang memerlukan
- e. Mengangkat koordinator
- f. Membuat buku pedoman organisasi, pedoman tatakerja dan kumpulan peraturan
- g. Berhubungan dengan alat perhubungan
- h. Membuat tanda, simbol, kode, dan lain-lain.

Menurut Sondang P. Siagian (1979 : 127) lebih lanjut menekankan bahwa koordinasi dalam suatu organisasi akan tercapai melalui :

1. Konfirmasi lengkap
2. Pertemuan berkala

3. Pembentukan panitia gabungan
4. Wawancara dan bawahan
5. Memorandum berantai

Adapun manfaat koordinasi menurut Soetarto (1992 : 31) adalah sebagai berikut :

- a) Dengan koordinasi dapat dihindari perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi diantara para pejabat yang ada dalam organisasi.
- b) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan suatu pendapat bahwa suatu suatu organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
- c) Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat .
- d) Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama
- e) Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkiana terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi
- f) Dengan koordinasi dapt dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi.
- g) Dengan koordinasi dapat menimbulkan kesadaran antara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
- h) Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran antara pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama.
- i) Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langakat antar pejabat.
- j) Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat.
- k) Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
- l) Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.

Selanjutnya Harold Koontz (S.P. Siagian, 2005 : 124) bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dan berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya ;

1. Adanya rencana kerja

Dalam pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah rencana kerja yang disusun dimana dalam rencana kerja telah digambarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini. Rencana kerja yang ada didalam koordinasi biasanya di proses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai dalam pelaksanaan koordinasinya dalam perencanaan kerja yang akan

dikoordinasikan diperlukan adanya penjabaran mengenai sasaran yang dikoordinasikan .

2. Adanya pertemuan-pertemuan

Dalam pelaksanaan koordinasi agar terjadinya sinkronisasi atau keselarasan dari pihak-pihak yang dikoordinir maka peranan daripada komunikasi dapat menunjang kelancaran tugas koordinator untuk menyatupadukan kegiatan yang sudah diprogramkan, dengan demikian jelas bahwa frekuensi pertemuan antara koordinator dengan orang-orang yang dikoordinir perlu ditingkatkan. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan program.

Dengan melakukan pertemuan dari setiap pihak dapat mengemukakan beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan solusinya untuk memecahkan hal tersebut, biasanya semakin banyak pertemuan yang dilakukan maka akan semakin memperlancar kegiatan yang di programkan.

3. Adanya komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah, komunikasi pengertiannya adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Dari hasil komunikasi inilah seseorang koordinator dapat melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

4. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja

Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok dalam melaksanakan program yang di lakukan oleh suatu organisasi adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau adanya ketidakpahaman antara pelaksana program yang menyebabkan pencapaian hasil kerja belum dapat optimal sesuai rencana kerja.

Dari pendapat diatas diatur wujud pelaksanaan koordinasi adalah komunikasi dan formalisasi. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi riil sebagai media koordinasi sedangkan formalisasi adalah pedoman pelaksanaan koordinasi oleh karena itu koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan dari unit-unit organisasi atau pimpinan organisasi disemua level untuk saling berkoordinasi dalam proses pelaksanaan kerja dibawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional (Sondang P. Siagian, 1979 : 127)

Berdasarkan pendekatan yang dikemukakan diatas, maka proses dan mekanisme tidak bermula dari koordinator tetapi dari setiap unit, dengan demikian berjalannya mekanisme koordinasi berasal dari kesadaran dan kesediaan setiap unit organisasi itu sendiri. Pendapat ini didukung oleh Daan Sugandha yang menyebutkan mekanisme koordinasi hanya akan mungkin terjadi jika ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan (untuk kerja sama antar organisasi) kedalam proses pelaksanaan kerja dibawah pengarahannya seseorang yang

mempunyai kewenangan fungsional tertentu dari orang-orang, kepala unit maupun kepala organisasi tertentu yang terlibat kerjasama (Daan Sugandha, 1999 : 97).

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan yang berkaitan dengan objek penelitian menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- **Wawancara**

Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara dalam menggali informasi dari masyarakat. Adapun tujuannya adalah agar mendapat informasi yang lebih banyak.

- **Dokumentasi**

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa gambar mengenai situasi dan kondisi lingkungan sebagai media agar dapat diamati dan diteliti lebih lanjut.

Analisa Data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan kepada prosedur riset yang menghasilkan data yang kualitatif yaitu ungkapan atau catatan yang diobservasi. Salah satu ciri metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian terutama pada perkembangan data yang dikembangkan. Metode ini menempatkan pola sebagai sasaran kajian dan bukan variabel sebagai sasarannya. Dalam penelitian kualitatif, sikap peneliti tidaklah mencari kebenaran dan moralitas akan tetapi usaha mencapai pemahaman untuk itu data sekunder yang akan diinterpretasikan sesuai dengan penelitian ini dan data tersebut kemudian diolah, dipilih serta uji keobjektifannya melalui perbandingan data.

HASIL PENELITIAN

Kelembagaan Birokrasi yang besar dan manajemen internal yang lemah menyebabkan kurang optimalnya kinerja birokrasi. Lemahnya manajemen internal salahsatunya ditunjukkan dengan lemahnya koordinasi. Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah dewasa ini adalah kurangnya koordinasi antar instansi. Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antardepartemen maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kelemahan koordinasi sering diselesaikan dengan pembentukan lembaga baru. Namun demikian, Hal inilah yang terlihat pada kelahiran lembaga koordinasi

atau lainnya dalam kelembagaan pemerintahan merupakan bukti lemahnya koordinasi antara institusi birokrasi.

Salah satu kunci utama pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan efisien adalah koordinasi yang efektif. Tiga syarat minimal koordinasi efektif yakni Pembagian tugas secara jelas dan tegas, manajemen internal dan Komitmen pimpinan. Pembagian tugas institusi secara jelas dan tegas harus dilakukan untuk menghindarkan dari tumpang tindih tugas dan fungsi institusi. Manajemen internal antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Didalam pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan banjir dikota pekanbaru tidak terlepas dari proses kerjasama diantara orang-orang yang terkait dalam penanganan banjir tersebut. Dimana dalam proses kerja sama itu di perlukan penerapan fungsi koordinasi untuk mencapai tujuan dan melancarkan kegiatan atau tugas yang dihadapi. Dengan adanya fungsi koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi/badan/instansi/ tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Harold Koontz (S.P. Siagian, 2005 : 124) pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan koordinasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi guna untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya :

1. Adanya rencana kerja

Dalam pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah rencana kerja yang disusun dimana dalam rencana kerja telah digambarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini. Rencana kerja yang ada didalam koordinasi biasanya di proses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai dalam pelaksanaan koordinasinya dalam perencanaan kerja yang akan dikoordinasikan diperlukan adanya penjabaran mengenai sasaran yang dikoordinasikan .

Dalam penelitian ini, rencana kerja telah disusun melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 49 Tahun 2009, bahwa semua yang terlibat dalam keanggotaan Satlak PB Kota Pekanbaru mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, dalam rangka penanganan bencana terutama. Diman setiap lembaga/ badan/ instansi tersebut membuat rencana kerja berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) dan Satuan Koordinasi Penanganan Bencana (Satkorlak PB) Propinsi Riau.

2. Adanya pertemuan-pertemuan

Dalam pelaksanaan koordinasi agar terjadinya sinkronisasi atau keselarasan dari pihak-pihak yang dikoordinir maka peranan daripada komunikasi dapat menunjang kelancaran tugas koordinator untuk menyatupadukan kegiatan yang sudah diprogramkan, dengan demikian jelas bahwa frekuensi pertemuan antara koordinator dengan orang-orang yang dikoordinir perlu ditingkatkan. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan program.

Dengan melakukan pertemuan dari setiap pihak dapat mengemukakan beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan solusinya untuk memecahkan hal tersebut, biasanya semakin banyak pertemuan yang dilakukan maka akan semakin memperlancar kegiatan yang di programkan.

Dalam hal melaksanakan fungsi koordinasinya, Satlak PB Kota Pekanbaru seharusnya melaksanakan pertemuan-pertemuan berupa rapat Koordinasi kepada seluruh keanggotaan Satlak PB sekurang-kurangnya 3 (Tiga) kali dalam satu tahun seperti yang tertuang pada Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : Satlak PB Kota Pekanbaru Mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan :

- a) Membahas rumusan kebijakan dalam pelaksanaan penanganan bencana.
- b) Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan penanganan bencana.
- c) Membahas masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan bencana.
- d) Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c dalam rangka memperlancar pelaksanaan penanganan bencana.
- e) Keputusan rapat Satlak PB Kota Pekanbaru mengikat semua Instansi/ Dinas/ Kantor/ bagian yang menjadi anggota Satlak PB Kota Pekanbaru.
- f) Apabila dipandang perlu Ketua/ Walikota dapat mengundang kepala pimpinan Instansi/ Dinas/ Kantor/ Bagian / Unsur-unsur lainnya yang ada kaitannya dan diperlukan dalam penanganan bencana.

Namun yang terjadi pada saat ini, Satlak PB Kota Pekanbaru tidak pernah melakukan rapat koordinasi sepanjang tahun 2011, dimana dinyatakan bahwa rapat dilakukan seadanya saja tanpa memperhatikan fungsi dari koordinasi itu sendiri.

3. Adanya komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah, komunikasi pengertiannya adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau

melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Dari hasil komunikasi inilah seseorang koordinator dapat melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

Masalah Komunikasi juga merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya pelaksanaan fungsi koordinasi itu sendiri, ketika rapat tidak dilakukan maka, para koordinator pencegahan dan penanganan banjir ini tidak mengetahui kendala dan halangan apa saja yang akan dihadapi dalam menjalankan program tersebut.

4. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja

Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh suatu organisasi adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau adanya ketidakpahaman antara pelaksana program yang menyebabkan pencapaian hasil kerja belum dapat optimal sesuai rencana kerja.

Dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2009 telah jelas memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada seluruh anggota Satlak PB Kota Pekanbaru, dimana Lembaga/ Badan/ Instansi yang terlibat telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam penanggulangan bencana yang ada di Kota Pekanbaru, dan semua pekerjaan itu pertanggung jawabannya langsung kepada Walikota. Jika dilihat dari susunan anggota yang ada pada Satlak PB Kota Pekanbaru, sangatlah besar, dimana dalam posisi tertentu instansi atau lembaga yang menjadi anggota hanya sebatas pelengkap saja tanpa tahu apa yang akan mereka lakukan dalam pelaksanaan program yang akhirnya menyebabkan hasil kerja yang tentunya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dari pendapat di atas juga bahwa wujud pelaksanaan koordinasi adalah komunikasi dan formalisasi. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi riil sebagai media koordinasi sedangkan formalisasi adalah pedoman pelaksanaan koordinasi oleh karena itu koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan dari unit-unit organisasi atau pimpinan organisasi disemua level untuk saling berkoordinasi dalam proses pelaksanaan kerja dibawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pencegahan dan pengendalian banjir di Kota Pekanbaru tidak berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) dengan instansi-instansi yang terkait sangat terbatas dan tidak sepenuhnya terlaksana.

2. Banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru Tidak hanya disebabkan oleh faktor biofisik yang meliputi curah hujan yang tinggi serta luapan air sungai Siak, tetapi juga sangat terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Secara teknis masalah tersebut menyebabkan perubahan penggunaan dan penutupan lahan sehingga menyebabkan fungsi resapan pada daerah hulu, tengah dan hilir tidak berfungsi optimal.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak serius dalam menjalankan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan permasalahan Banjir di Kota Pekanbaru, terutama Peraturan Daerah mengenai Sumur Resapan dan Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemerintah Kota pekanbaru tidak memiliki Master Plan dalam Menggulangi bencana banjir yang ada di Kota Pekanbaru.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Keterlibatan semua aktor secara menyeluruh serta saling bekerjasama dalam pencegahan dan pengendalian banjir di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan harus lebih serius untuk menjalankan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan permasalahan Banjir di Kota Pekanbaru
3. Minimnya dana merupakan kendala dalam penanganan banjir di Kota Pekanbaru, seharusnya Pemerintah memikirkan alokasi dana yang cukup besar dalam APBD untuk menangani masalah banjir.
4. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan menyelesaikan Master Plan Penanganan banjir secepatnya, karena Master Plan menjadi acuan dalam penanganan masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiningrat, Soewarno, (2000). *Pengantar Ilmu dan Administrasi Manajemen*. PT Gunung Agung, Yogyakarta.
- Kodoatie, J. Robert (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, (2003). *Kybernologi I*. PT Adhi Mahasatya, Jakarta.
- Ryadi dan Bratakusumah, Deddy S, (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Menggali Potensi Dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siagian, Sondang P., (1979). *Filsafat Administrasi*. PT Gunung Agung, Jakarta.
- _____, (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soepomo, (2006). *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. LAN RI, Jakarta.
- Soetarto, (1992). *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Sugandha, Daan, (1988). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. PT Intermedia, Jakarta.
- Syafiie, Inu K, (1998). *Manajemen Pemerintahan*. PT Pertja, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, (1990). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.